

BAB I

PENDAHULUAN

Tanggal 20 Mei 2002 merupakan hari bersejarah bagi negara Timor Leste. Timor Leste mendapatkan kemerdekaannya secara resmi pada tanggal 20 Mei 2002 dengan nama resmi *Republic Democratic de Timor Leste*. Sebelum mencapai kemerdekaannya, tercatat ada beberapa negara yang pernah menduduki dan menguasai Timor Leste, diantaranya adalah Indonesia dan Portugal. Selain Indonesia dan Portugal, Timor Leste juga pernah menjadi rebutan antara Jepang dan Australia pada masa Perang Dunia II. Letaknya yang strategis menjadikan Timor Leste diperebutkan untuk menjadi basis persenjataan pada masa PD II. Selain letaknya yang strategis, Timor Leste juga memiliki kekayaan alam seperti kayu cendana, kopi dan gas alam yang membuat negara-negara lain ingin menguasainya.

Pembahasan dalam bab ini berisikan latar belakang masalah yang akan mengupas tentang kemerdekaan Timor Leste atas Indonesia dan konflik yang terjadi di Timor Leste, pokok permasalahan, kerangka teoritis dengan menggunakan konsep kudeta yang tawarkan oleh Eric A. Nordlinger, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 19 Oktober MPR-RI mencabut Undang-Undang tahun 1976 tentang penggabungan Timor-Timur sebagai sebuah provinsi (Timor-Leste), dan pada tanggal 25 Oktober Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1272 (1999) yang membentuk Pemerintahan Transisi PBB untuk Timor-Leste (UNAMET) yang menjadikan PBB sebagai pemegang otoritas pemerintahan resmi untuk Timor-Leste.

Petugas PBB mendarat di Timor-Leste beberapa saat setelah penandatanganan Kesepakatan 5 Mei 1999 untuk menilai situasi dan bantuan yang dibutuhkan misi pemilihan. Staf UNAMET mulai bekerja pada akhir bulan Mei dan pada tanggal 4 Juni 1999 bendera PBB dikibarkan di kantor PBB di Dili. Staf UNAMET berdatangan selama bulan Juni, yang terdiri dari petugas pemilihan sipil polisi sipil tak-bersenjata dan perwira-penghubung militer dari negara-negara di seluruh dunia.

Tugas terpenting dari UNAMET adalah mengadakan pemilu untuk memilih orang-orang yang akan menyusun konstitusi di Timor Leste. Proses penyusunan konstitusi Timor Leste selesai pada bulan Maret 2002. setelah hampir satu tahun dalam proses penyusunannya akhirnya konstitusi Timor Leste baru disetujui pada tanggal 24 Maret 2002.¹ dengan disetujuinya konstitusi maka Timor Leste siap memproklamkan kemerdekaannya. Proklamasi kemerdekaan adalah tanda

¹ "Brief History of Timor Leste" <http://www.gov.pvt.tl/timor-portal/about/TimorLeste/brief.htm>

berakhirnya tugas UNAMET di Timor Leste. Rakyat Timor Leste bebas sekaligus bertanggung jawab atas masa depannya sendiri.

Pasca kemerdekaan Timor Leste dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1999 keadaan pemerintahan di negara itu terus bergejolak hal tersebut terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah yang ada, dimana terus terjadi persaingan antar elite politik untuk mendapatkan kekuasaan di Timor Leste.

Jose Ramos Horta dilantik sebagai Presiden Timor Leste pada Senin 10 Juli 2006 Jose Ramos Horta bertekad mengakhiri kekerasan dan fokus pada pemeliharaan keamanan. Janji itu harus diucapkan karena selama dua bulan menjelang pelantikan tersebut, pemerintah Timor Leste tidak bisa mengendalikan keamanan dan ketertiban. Kemudian, Senin pagi tanggal 11 Februari 2008 Horta tertembak di perut saat terjadi baku tembak di rumahnya antara pengawal dan tentara-tentara pembelot pimpinan Alfredo Reinado². Tertembaknya Horta adalah bukti bahwa dia tidak bisa memenuhi janjinya untuk menjaga keamanan di Timor Leste.

Pemberontakan yang dilakukan oleh pasukan pimpinan Alfredo Reinado ini bermula dari pemecatan sejumlah pasukan Timor Leste oleh Perdana Menteri Mari Alkatiri pada bulan April 2006. Hal tersebut memicu terjadinya konflik Mei 2006 yang dilakukan oleh pasukan yang menolak adanya pemecatan atas mereka yang dianggap tidak profesional.

Banyak hal yang mendorong pasukan pemberontak untuk terus memperjuangkan nasib mereka, ketidakadilan pemerintah pusat menjadi salah satunya. Menurut Alfredo ketimpangan distribusi kekuasaan di negerinya dianggap sebagai bentuk diskriminasi. Misalnya, ketika diwawancarai salah satu stasiun TV swasta Indonesia tahun lalu, beberapa saat setelah Alfredo dan anak buahnya disersi meninggalkan markas di Caicoli Dili Mei 2006, akibat pemecatan terhadap 591 pasukan Falintil (angkatan bersenjata) Timor Leste Alfredo menegaskan pemecatan itu tidak terkait profesionalisme. Tetapi ada faktor kesukuan dan kewilayahan³.

Penyebab pemecatan separuh pasukan bersenjata Timor Leste adalah karena alasan diskriminasi. Peristiwanya bermula dari keresahan sejumlah prajurit yang mengeluhkan buruknya kesejahteraan tentara. Mereka yang berasal dari daerah barat merasa diperlakukan tidak adil. Ditempatkan di daerah terpencil, lambat promosi kenaikan pangkat dan selalu dicurigai berhubungan dengan milisi pro-Indonesia. Merasa keluhannya tidak mendapat tanggapan dari pimpinan militer sehingga para prajurit melakukan protes dengan meninggalkan barak. Akhirnya sejumlah pasukan dipecat karena hal tersebut tetapi sebagian besar prajurit yang dipecat adalah mereka yang bertugas di barat yaitu perbatasan Timor Leste dengan Indonesia.

Keputusan pemecatan itu berakibat fatal. Kelompok pembangkang malah membangun markasnya 25 kilometer sebelah selatan Dili. Mereka merasa kuat karena

³ "Pemberontakan Alfredo" *http://www.kompas.com* (diakses 10/10/2006)

jumlahnya hampir separuh dari 1.400 personel Timor Leste. Kemudian dari markasnya mereka melancarkan propaganda dan provokasi⁴. Sejak saat itu Mayor Alfredo dan pendukungnya setiap hari bergerak meneror Dili. Tentara dan polisi yang setia pada pemerintah tidak mampu mengatasinya. Ditambah lagi komunikasi dengan markas komando selalu diganggu. Sehingga kota Dili menjadi porak-poranda.

Isu yang tadinya menyangkut internal tentara berubah menjadi berdimensi politik, kesukuan, dan militer. Ketiga faktor tersebut memicu terjadi kerusuhan di tengah realita rakyat yang mengalami kesulitan ekonomi dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Isu tersebut sangat mudah menimbulkan kerusuhan. Maka penggunaan kekerasan berkembang pesat Pemerintah Timor Leste secara resmi menyerahkan penanganan keamanan kepada pasukan Australia. Keputusan menyerahkan wewenang keamanan itu diambil Presiden Timor Leste saat itu Xanana Gusmao Perdana Menteri Mari Alkatiri dan ketua Parlemen pada akhir Mei 2006⁵.

Orang yang tahu politik sederhana bisa bertanya bagaimana bisa suatu pemerintah negara yang berdaulat menyerahkan wewenang keamanan kepada negara lain. Itu berarti sama saja para pemimpin negeri tersebut menyatakan diri tidak sanggup mengatasi persoalan dasar negerinya. Dengan mengundang pasukan asing untuk mengatasi persoalan domestik pemerintah Timor Leste sebenarnya telah

4 "Geger Timor Leste dan Mayor Alfredo Reinado". *Kompas*, 09 Juni 2006.

mengumumkan dirinya tidak berdaulat. Tentunya hal tersebut membuat pasukan pemberontak makin tidak percaya dengan pemerintah Timor Leste.

Kudeta yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Februari 2008 mengejutkan masyarakat dunia maupun rakyat Timor Leste sendiri karena sebelumnya memang tidak ada tanda-tanda akan adanya suatu kudeta. Bahkan gabungan pasukan keamanan Australia dan Timor Leste yang bertugas mengamankan wilayah tersebut tidak menduga akan adanya hal-hal yang mencurigakan. Horta terkena tiga tembakan, satu di perut dan dua di dada dan seorang pengawalnya tewas. Tentara Australia lalu mengevakuasi Horta ke rumah sakit lapangan tentara internasional di Dili. Horta diterbangkan ke Darwin Australia dan tiba sore hari⁶.

Tapi sebelumnya, Reinado menuduh Perdana Menteri Xanana bersama Ramos Horta terlibat dalam insiden April dan Mei 2006 di mana sekitar 37 orang mati dan 100.000 lebih masih mengungsi. Saat itu adalah upaya menjatuhkan PM Alkatiri yang diorkestrasi mantan PM Australia John Howard karena bertentangan dengan Fretilin⁷. Dan hal tersebut merupakan salah satu faktor terjadinya pemberontakan Mei 2006.

Kudeta yang dilakukan pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Alfredo bermaksud untuk merebut kekuasaan pemerintah saat ini yang mereka anggap tidak tepat untuk rakyat Timor Leste. Namun demikian kudeta yang dilakukan oleh

⁶ <http://jawabali.com/luar-negeri/problem-mendasar-timor-leste-680/trackback>

Reinado dan kelompoknya hanya berlangsung satu hari saja. Upaya pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Alfredo tersebut berhasil digagalkan oleh pasukan pengawal Presiden Timor Leste.

B. Pokok Permasalahan

Mengapa kudeta yang dilakukan Alfredo dan kelompoknya gagal?

C. Kerangka Teori

Dalam upaya memahami dinamika dan momentum pemberontakan sekaligus dan kudeta yang dilakukan Alfredo Reinado dan para pengikutnya yang mengalami kegagalan penulis menggunakan konsep kudeta yang dikembangkan oleh Nordlinger

Pemberontak dalam pengertian umum adalah sebuah upaya penolakan terhadap otoritas. Pemberontakan dapat timbul dalam berbagai bentuk, mulai dari pembangkangan sipil (*civil disobedience*) hingga kekerasan terorganisir yang berupaya meruntuhkan otoritas yang ada. Istilah ini sering pula digunakan untuk merujuk pada perlawanan bersenjata terhadap pemerintah yang berkuasa, tapi dapat

merujuk pada gerakan perlawanan tanpa kekerasan⁸. Personal atau komunitas yang melakukan pemberontakan disebut pemberontak. Aksi pemberontakan pada umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut⁹:

1. Ketidaktaatan sipil (*civil disobedience*).
2. Aksi pemberontakan pada umumnya dijalankan oleh pejuang kebebasan (*carried out by freedom fighters often to occupying invader*).
3. Pada umumnya perubahan yang dituntut adalah menyangkut masalah ekonomi dan social-politik (*often means to indicate a desire of change in the form of government and social-economic system*).
4. Pada umumnya semangat kaum pemberontakan adalah berjiwa militan (*Uprising militant*).
5. Aksi pemberontakan pada umumnya ditujukan terhadap angkatan bersenjata lokal dan apabila gagal maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi total

*(Revolt a localized rebellion, whose leaders, while wanting some form of change, lack the foresight that a revolution's leaders have. While they might overpower the local forces, they more often than not fail to defeat a major army, if they do it, tends to evolve into a full scale revolution)*¹⁰

Antara aksi pemberontakan dan gerakan sosial pada umumnya memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal pemberontakan merupakan

⁸ B.M, Marbun, *Kamus Politik : Edisi Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2007 , hal.409.

⁹ "The Definition of Revolution" *Merriam-Webster Online*, 2005

salah satu kendaraan politik dari sebuah gerakan sosial untuk merealisasi agenda-agenda yang telah ditetapkan sebelumnya. Kudeta didefinisikan sebagai:

1. Perebutan kekuasaan terhadap pemerintah dengan menggunakan kekerasan atau paksaan.
2. Pengambilalihan kekuasaan yang dilakukan secara tiba-tiba dan inskonstitusional. Kudeta selalu dilakukan oleh kelompok kecil militer atau sipil yang kecewa dengan situasi politik dalam negerinya.

Sebenarnya asal kata kudeta berasal dari bahasa Perancis yaitu *Coup d'etat*. Kudeta bisa saja dianggap sebagai satu kegiatan yang relatif sederhana. Militer mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk melakukan tindak kekerasan, pasukannya dapat dimobilisir guna menentang kemungkinan terdapat penentangan yang kecil dari orang sipil, mungkin juga tidak sama sekali, karena jarang sekali militer mencoba menggulingkan pemerintah yang sah. Kudeta terjadi dari infiltrasi ke dalam suatu segmen aparatur negara kecil tetapi menentukan, yang kemudian digunakan untuk mengambil alih pemerintah dari unsur-unsur lainnya.

Menurut Eric A. Nordlinger adapun kudeta bisa berhasil apabila terdapat tiga syarat penting, meskipun tidak menutup kemungkinan terdapat syarat lain karena ada beberapa hal khusus lainnya yang tidak terdapat dapat menyebabkan suatu kudeta

gagal. Ketiga syarat yang menentukan keberhasilan kudeta ialah¹¹: **Pertama** keterlibatan aktif perwira menengah yang menduduki pos-pos strategis. Bataliyon infantri dan mobil lapis baja yang berada di dalam kota atau yang berhampiran dengannya biasanya memulai kudeta. Dan para perwira menengah yang menguasai pasukan harus ditempatkan di tempat strategis. Prinsip setia pada pimpinan dan patuh pada atasan menyebabkan pasukan ini dapat menguasai keadaan. Tapi bukan berarti keterlibatan perwira senior diabaikan, tapi pemimpin yang menduduki pos-pos strategis adalah penting. **Kedua** anggota komplotan harus mempunyai jumlah pasukan yang memadai untuk menaklukkan penentang utama kudeta itu termasuk beberapa lokasi dan bangunan penting tertentu. Jumlah pasukan yang mereka kuasai haruslah cukup besar untuk bisa menggulingkan kekuasaan baik dari kalangan sipil maupun militer secara serempak. Pada saat yang sama juga stasiun-stasiun, pemancar radio, televisi serta jaringan telepon mengatur posisi mereka dan mendapatkan dukungan untuk melakukan perlawanan. Dengan demikian semakin besar anggota semakin besar kesempatan untuk berhasil. **Ketiga** ketepatan koordinasi merupakan unsur penting dalam pelaksanaan kudeta. Kudeta yang tidak bisa dijalankan secara tepat dan diselaraskan dengan baik umumnya akan menemui kegagalan. Selain syarat-syarat internal di atas menurut Nordlinger, keberhasilan kudeta juga bisa

¹¹ Eric A. Nordlinger, *Militar Dalam Politik Kudeta dan Demokrasi*, PT Remaja Cipta, Jakarta, hal. 148-155

dipengaruhi oleh faktor lain yaitu eksternal seperti berupa dukungan internasional.¹²

Bentuk dukungan internasional antara lain: dana, persenjataan dan politik.

Dipecatnya sejumlah pasukan militer Timor Leste oleh pemerintah menimbulkan konflik yang berkepanjangan, adanya dugaan diskriminatif terhadap sejumlah pasukan menjadi salah satu penyebabnya. Berbagai kekerasan mulai terjadi di sejumlah wilayah sebagai tanda protes atas ketidakadilan pemerintah Timor Leste. Adapun pasukan pemberontak menempatkan diri mereka di pedalaman yang jauh dari daerah-daerah strategis. Jumlah pasukan yang hampir separuh dari jumlah prajurit Timor Leste rupanya tidak cukup kuat untuk merebut pemerintahan, hal tersebut dikarenakan Timor Leste mendapat bantuan keamanan dari Australia sehingga pasukan pemberontak jadi kalah jumlah dan persenjataan dibanding dengan mereka. Keadaan para pemberontak yang terus tersisih dan makin terancam menyebabkan mereka akhirnya melakukan kudeta pada 11 Februari yang ternyata dapat diatasi oleh pasukan keamanan Timor Leste.

D. Hipotesa

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di muka dan didukung oleh teori yang dipandang berguna untuk membantu menganalisis penelitian, maka penelitian

beranggapan bahwa Gagalnya Kudeta di Timor Leste yang dilakukan Alfredo terhadap pemerintahan Ramos Horta disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang menyebabkan gagalnya kudeta di Timor Leste adalah: **Pertama**, Pasukan pemberontak tidak berhasil menduduki tempat-tempat vital di Timor Leste. **Kedua**, Kurangnya jumlah pasukan dan **Ketiga** jumlah persenjataan pemberontak lebih sedikit dibanding pasukan keamanan gabungan Timor Leste dengan Australia.

Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan gagalnya kudeta di Timor Leste adalah tidak adanya dukungan internasional terhadap pasukan pemberontak sehingga pasukan pemberontak tidak dapat menekan pemerintah untuk memenuhi tuntutan para pemberontak.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitiannya adalah deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan bagaimana suatu hal terjadi atau memaparkan data-data yang ada. Data yang berhasil dikumpulkan tersebut kemudian akan dianalisis melalui pendekatan kualitatif

Pengumpulan data yang dibutuhkan bagi penelitian ini dilakukan dengan melalui teknik penelitian kepustakaan (*library research*)¹³. Penelitian menggunakan data sekunder, yaitu merupakan hasil-hasil penelitian orang lain dan berbentuk tulisan yang telah dipublikasikan, baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel, media cetak dan media lainnya serta laporan dari berbagai sumber yang relevan bagi penelitian ini. Data-data yang diperoleh untuk penulisan ini kemudian diakumulasikan dan dikomparasi sehingga dapat diperoleh generalisasi terhadap data-data tersebut. Serta data-data sekunder yang menjadi dokumen di dalam penulisan ini diperoleh perpustakaan umum, situs internet, maupun koleksi pribadi.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dan penentuan batas-batas ruang lingkup penelitian ini nantinya dapat lebih terfokus pada masalah spesifik yang mampu berpengaruh pada analisis masalah.

Jangkauan penelitian ini dimulai dari Mei 2006 karena saat itu Alfredo mulai melakukan aksi pemberontakannya di Timor Leste sebagai aksi protesnya terhadap pemerintah dan penulis memberi batasan akhir pada Februari 2008 karena saat itu Alfredo tewas dalam penyerangan kudeta di kediaman Ramos Horta.

pemerintah dan penulis memberi batasan akhir pada Februari 2008 karena saat itu Alfredo tewas dalam penyerangan kudeta di kediaman Ramos Horta.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari apa yang diuraikan dalam pendahuluan, maka disajikan sistematika yang terbagi dalam 5 bab, yaitu:

Bab I, berisikan tentang pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, berisikan tentang keadaan Timor Leste pra referendum sampai sehingga Timor Leste berdiri menjadi negara sendiri.

Bab III, berisikan tentang rentannya Timor Leste terhadap pemberontakan pasca referendum serta gejolak politik yang terjadi selama masa transisi.

Bab IV, berisikan tentang analisa masalah pemberontakan yang terjadi dari Februari 2007. Faktor-faktor internal yang mengagalkan kudeta dan faktor eksternal berupa bantuan militer Australia.

Bab V, penulis nantinya akan menyajikan kesimpulan. Kesimpulan ini didasarkan pada data, data, dan analisis yang dijabarkan pada bab-bab sebelumnya.